



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 25 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Mifta Hurahman Maulana, S.H.
tempat / tanggal lahir	:	Nganjuk, 07 September 1999
NIP	:	199909072025041005
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	PPUPD Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 24 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Marita Tri Lestiyantiningsih, S.H.
tempat / tanggal lahir	:	Sidoarjo, 27 Maret 1995
NIP	:	199503272025042006
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	PPUPD Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 12 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Karina Rahmawardani, S.H
tempat / tanggal lahir	:	Gresik, 20 Oktober 1994
NIP	:	199410202019032010
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
j a b a t a n	:	Auditor Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



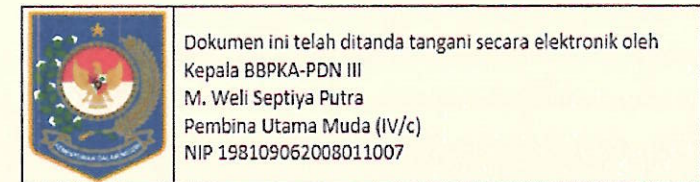
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 8 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Johan Hadipradana Elisa, SH
tempat / tanggal lahir	:	Jombang, 19 Juli 1990
NIP	:	199007192019031004
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
j a b a t a n	:	Auditor Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



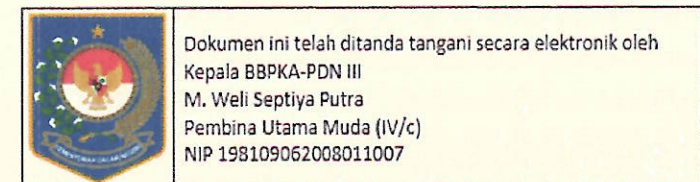
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 14 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Ismaning Wati, S.T
tempat / tanggal lahir	:	Surabaya, 14 April 1990
NIP	:	199004142025042001
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	Auditor Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 15 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a : **Irsya Pratiwi, A.Md. Ak.,**
tempat / tanggal lahir : Surabaya, 15 Juli 2000
NIP : 200007152022012003
pangkat / gol.ruang : Pengatur Tk. I (II/d)
j a b a t a n : Auditor Terampil
i n s t a n s i : Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.

Jakarta, 12 Juni 2026

a.n.Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



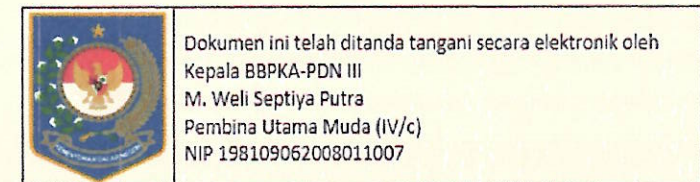
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 9 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Inggar Wahyuningtyas, SE
tempat / tanggal lahir	:	Semarang, 06 Februari 1995
NIP	:	199502062019032007
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
j a b a t a n	:	Auditor Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



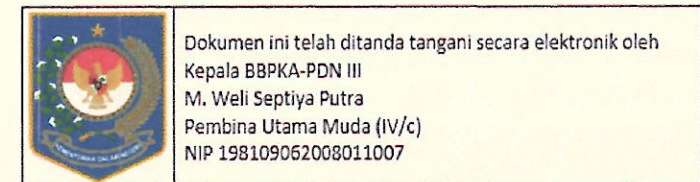
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSRé Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 11 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a : **I Dewa Nyoman Arthawan, S.H.**
tempat / tanggal lahir : Surabaya, 22 Maret 1991
NIP : 199103222019031006
pangkat / gol.ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
j a b a t a n : Auditor Ahli Pertama
i n s t a n s i : Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 7 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Hakim Putra, S.E.
tempat / tanggal lahir	:	Sidoarjo, 03 Oktober 1984
NIP	:	198410032015021001
pangkat / gol.ruang	:	Penata Tk. I (III/d)
j a b a t a n	:	Auditor Ahli Muda
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n.Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSR E Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 19 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Fani Rachmadiyanto, S.Tr.I.P.
tempat / tanggal lahir	:	Gresik, 15 November 2001
NIP	:	200111152024091003
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	PPUPD Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.

Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



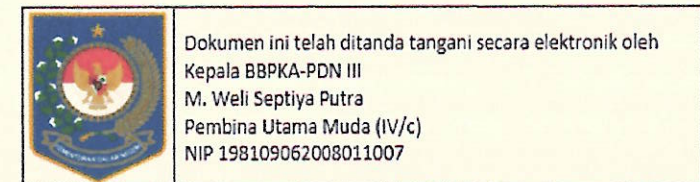
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice:</i> Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 2 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a : **Drs. Nurul Muchid, M.Si**
tempat / tanggal lahir : Gresik, 29 Maret 1971
NIP : 197103291989101001
pangkat / gol.ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
j a b a t a n : Inspektur Pembantu II
i n s t a n s i : Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSR E Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 1 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Dr. Achmad Hadi, S.P., M.T., CGCAE., CFrA.
tempat / tanggal lahir	:	Gresik, 01 Januari 1974
NIP	:	197401011998031013
pangkat / gol.ruang	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
j a b a t a n	:	Inspektur
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n.Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKjIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 23 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Dimas Putra Sugiantoro, S.H.
tempat / tanggal lahir	:	Bojonegoro, 08 September 1996
NIP	:	199609082025041003
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	PPUPD Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSR E Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 13 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Diah Yuni Islami, S.H.
tempat / tanggal lahir	:	Sidoarjo, 02 Juni 1994
NIP	:	199406022025042004
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	Auditor Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 16 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Ari Purnomo Aji., A.Md. Ak
tempat / tanggal lahir	:	Kediri, 04 Februari 1999
NIP	:	199902042022011001
pangkat / gol.ruang	:	Pengatur Tk. I (II/d)
j a b a t a n	:	Auditor Terampil
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.

Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN III
M. Weli Septiya Putra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 198109062008011007



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 21 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Ageng Bagus Ari, S.Ak.
tempat / tanggal lahir	:	Jombang, 22 Maret 1995
NIP	:	199503222025041003
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	PPUPD Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



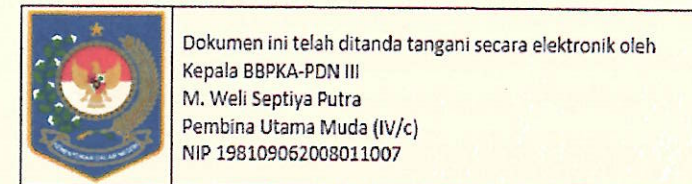
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKjIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 18 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Yuni Listianingrum, S.H
tempat / tanggal lahir	:	Tuban, 30 Juni 1986
NIP	:	198606302020122006
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
j a b a t a n	:	PPUPD Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



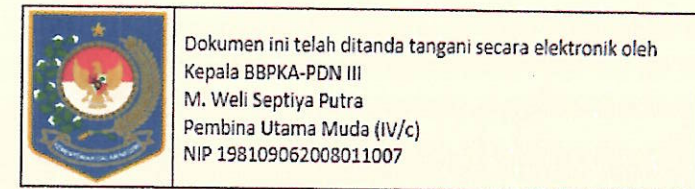
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.